

NEWSLETTER

MIGRANT CARE

Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

EDISI KHUSUS PEMILU 2019

MEMPERJUANGKAN ASPIRASI PEKERJA MIGRAN DALAM PEMILU

**PEMILU TIDAK SERENTAK
DI LUAR NEGERI**

**KEPENTINGAN
BURUH
MIGRAN**

**TIDAK ADA
PEKERJA MIGRAN
DALAM DEBAT
PERDANA CALON
PRESIDEN**

**PENYUSUNAN
MODUL PENDIDIKAN POLITIK
BAGI PEKERJA MIGRAN**

**PEREMPUAN
DAN
NIHILISME DEMOKRASI**

**AKSI KOLEKTIF MASYARAKAT SIPIL
MEMASTIKAN AGENDA
PERLINDUNGAN PEREMPUAN**





MIGRANT CARE

Perhimpunan Indonesia
untuk Buruh Migran Berdaulat

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab

Wahyu Susilo

Redaktur Pelaksana

Zulyani Evi

Anggota Redaksi

Anis Hidayah

Fitri Lestari

Ika Masruroh

Nor Zana bt Mohd Amir

Nurharsono

Siti Badriyah

Yovi Arista

Safina Maulida

Editor

Wahyu Susilo

Alamat Redaksi

Jl. Jatipadang I No. 5A, Jati
Padang, Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12540
Telp/Fax : +62 21-27808211
e-mail: secretariat@migrant-care.net
www.migrantcare.net

PENGANTAR REDAKSI

Salam buruh migran!

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses yang wajib dilalui setiap negara demokratis. Dalam Pemilu tentu kita menginginkan perubahan peradaban politik menuju penghargaan hak asasi dan pemihakan kepada Pekerja Migran Indonesia. Kita tentu tidak ingin tema-tema besar pembangunan atau isu-isu strategis di bidang keamanan dan makro ekonomi saja yang diangkat kepada publik. Persoalan migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang diisi dengan mayoritas konstituen perempuan, menjadi urgensi yang perlu dibahas dan dimasukkan ke dalam agenda politik.

Di sisi lain, keterasingan perempuan miskin di pedesaan dari konsep kewargaan membuat mereka enggan berpartisipasi dalam politik atau dalam hal ini memberikan suaranya dalam Pemilu. Jarak itu diperlebar bagi mereka yang kerja bermigrasi ke luar negeri. Keterbatasan kepanjangan tangan negara di luar negeri dalam wilayah hukum negara lain membuat mereka semakin berjarak dengan partisipasi politik. Disparitas ini semestinya diisi dengan agenda-agenda politik Capres-Cawapres dan Caleg yang lebih berpihak kepada Pekerja Migran Perempuan.

Penerbitan Newsletter Migrant CARE Edisi Khusus Pemilu 2019, adalah upaya untuk memberikan narasi alternatif dalam pengarusutamaan isu pekerja migran Indonesia dan perempuan. Terdapatnya perubahan mekanisme yaitu pertama kalinya pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dilakukan serentak, membuat urgensi untuk menyediakan informasi yang komprehensif untuk mendukung ketercukupan informasi bagi masyarakat pemilih, khususnya pekerja migran perempuan di luar negeri.

Salam.

Redaksi Newsletter Migrant CARE mengundang seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan ide, pendapat atau gagasan dalam bentuk tulisan (makalah, artikel, essay, feature) berkaitan dengan buruh migran di Newsletter Migrant CARE. Tulisan juga akan dimuat di website www.migrantcare.net

Alamatkan tulisan anda ke: secretariat@migrantcare.net dengan subject: **Opini_Newsletter MC**

DAFTAR ISI

1 Pengantar Redaksi

FOKUS UTAMA

3 Memperjuangkan Aspirasi Pekerja Migran dalam Pemilu

7 Tidak Ada Pekerja Migran dalam Debat Perdana Calon Presiden

KILAS PROBLEMATIKA

9 Pemilu tidak Serentak di Luar Negeri

OPINI

11 Perempuan dan Nihilisme Demokrasi

KEGIATAN MIGRANT CARE

14 Aksi Kolektif Masyarakat Sipil Memastikan Agenda Perlindungan Perempuan

15 Penyusunan Modul Pendidikan Politik Bagi Pekerja Migran

Newsletter ini disusun dan dicetak oleh Migrant CARE dengan dukungan dari MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Program MAMPU adalah inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini menjadi tanggung jawab Tim Redaksi dan tidak mewakili pernyataan maupun pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

FOKUS UTAMA

Memperjuangkan Aspirasi Pekerja Migran dalam Pemilu

Salah satu penanda transisi demokrasi di Indonesia selepas kejatuhan Soeharto adalah penyelenggaraan Pemilu multi-partai yang diikuti oleh partai-partai politik secara bebas, diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu dan diawasi oleh pengawas Pemilu yang independen serta terbuka untuk dipantau oleh pemantau Pemilu, baik pemantau domestik maupun internasional.

Pemilu di Indonesia juga semakin berkembang, dari sistem Pemilu yang hanya mengkontestasi partai politik sebagai peserta utama Pemilu, menuju kontestasi langsung kandidat. Mulai dari anggota parlemen, kepala daerah dan presiden, tentu dengan prasyarat dukungan dari partai-partai politik yang memenuhi syarat.

Perempuan dan Politik adalah salah satu tema penting yang selalu diusung sejak berlangsungnya Pemilu demokratis di Indonesia. Ada dorongan kuantitatif sebagai argumen tuntutan mengakomodasikan peran perempuan dalam politik, yaitu jumlah perempuan sebagai pemilih dan penduduk mencapai lebih kurang dari 50 persen (pemilih/penduduk). Dorongan yang lebih substantif lagi datang melihat artikulasi kepentingan perempuan di sepanjang masa Orde Baru dimarginalisasi dan didomestifikasi.

Mengacu pada penyelenggaraan pengalaman Pemilu 1999 di Indonesia, lembaga global yang memberi perhatian pada Pemilu, IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), menerjemahkan buku panduan Pemilu dan perempuan berjudul Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah. Capaian terbesar dari tuntutan ini adalah terakomodasinya desakan adanya keputusan politik kuota perempuan di dalam sistem elektoral dan kepartaian. Di dalam skema pembangunan global (baik MDGs maupun SDGs serta Human Development Index), kuota perempuan di parlemen dan pemerintahan kemudian menjadi ukuran kemajuan perempuan suatu negara.



Dok. Migrant CARE/2014

Tahukah kamu?

Di Filipina, masalah perlindungan buruh migran menjadi salah satu isu yang menonjol dalam kampanye Pemilu. Bahkan dalam sistem Pemilu di Philipina, memungkinkan buruh migran membuat partai politik untuk berkontestasi di dalam sistem party-list, Pemilu yang diikuti oleh kelompok-kelompok sektoral.

Dalam Pemilu tahun 2016 di Filipina, aspirasi buruh migran diperjuangkan oleh Migrante Party-List, Gabriela Party-List, dan OFW Party-List. Perwujudan dan pemenuhan hak politik buruh migran Filipina ini adalah bentuk konkrit balasan kontribusi yang telah diberikan buruh migran Filipina atas pembangunan sosial dan ekonomi Philipina melalui remitansinya. Bagaimana dengan Indonesia?

Tentu saja perkembangan tersebut di atas tidak dengan segera memberi kontribusi signifikan pada kemajuan peran politik perempuan, artikulasi politik perempuan serta agenda politik perempuan setelah penyelenggaraan Pemilu tahun 2004, 2009 dan 2014. Masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan upaya memperjuangkan aspirasi perempuan dalam politik di parlemen. Tantangan tersebut tidak hanya karena berhadapan dengan dominasi politik elektoral yang masih patriarkis, tetapi juga perkara politik uang dan marginalisasi aspirasi perempuan dalam kontestasi politik publik.

Pemilu 2019 makin terlihat patriarkis ketika isu agama muncul mendominasi baik sebagai hoax, tuntutan politik ataupun akomodasi pemilih. Benar apa kata Eka Kurniawan dalam artikelnya di New York Times yang menyatakan walau belum tuntas Pemilu 2019, pemenangnya sudah bisa ditebak, yaitu isu agama.

Situasi ini tentu menjadi tantangan berat bagi upaya untuk mendesakkan isu perempuan dan isu perlindungan pekerja migran dalam kontestasi politik kandidat parlemen maupun presiden dan wakil presiden. Walau menjadi isu marginal, sebenarnya sejak tahun 2009, ada beberapa kandidat yang berkontestasi di Pemilu mengusung isu perlindungan pekerja migran. Untuk diketahui, di sepanjang Pemilu 2009 dan 2014, agenda perlindungan buruh migran perempuan Indonesia menjadi salah satu tema prioritas yang diangkat para kandidat parlemen perempuan Indonesia, baik yang berkontestasi di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Beberapa anggota parlemen perempuan yang lolos dengan memperjuangkan isu agenda perlindungan perempuan antara lain Rieke Diah Pitaloka, Nova Riyanti Yusuf, Okky Asokawati, Irma Suryani, Eva Kusuma Sundari dan Nihayatul Wafiroh. Kiprah mereka di parlemen juga memperlihatkan konsistensi pada agenda yang diusung sejak berkampanye sebagai kandidat perempuan. Mereka menjadi motor penggerak legislasi perlindungan buruh migran mulai dari Ratifikasi Konvensi PBB untuk Perlindungan Buruh Migran (hingga lahir UU No. 6 Tahun 2012) hingga UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Migrant CARE berharap, di Pemilu 2019 ini isu perlindungan pekerja migran Indonesia makin kuat untuk diperjuangkan, terutama oleh para Caleg di Dapil II DKI Jakarta yang salah satunya mewakili pemilih luar negeri, Caleg-Caleg di daerah basis buruh migran dan tentunya adalah para capres dan cawapres yang bertarung. (WAHYU)

DPT pada Pemilu 2019 berjumlah

192.828.520 orang



190.770.329 orang
Pemilih di dalam negeri



2.058.191 orang
Pemilih di luar negeri

Pemilu Indonesia di luar negeri akan dilaksanakan di

130 wilayah

(129 Kantor Perwakilan/KJRI/KBRI dan 1 Kantor Dagang Ekonomi)

56% perempuan mayoritasnya adalah **Pekerja Migran**

Jika Pemilu 2019 di Indonesia dilaksanakan serentak, Pemilu 2019 di Luar Negeri dilaksanakan lebih awal dan dengan mekanisme yang beragam

*DPT = Daftar Pemilih Tetap

1

Waktu Pelaksanaan

Pemungutan Suara

8 - 14 April 2019

Perhitungan Suara

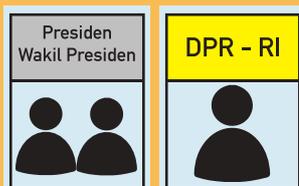
17 April 2019

Surat Suara

Saat Pemilu, pemilih di dalam negeri akan mendapatkan lima surat suara, meliputi:



Sedangkan pemilih di luar negeri hanya akan mendapatkan dua surat suara, meliputi:



3

Mekanisme Pemilihan

terdapat tiga mekanisme pemilihan yang disediakan:



Datang Langsung ke TPS

TPS akan disediakan di kantor perwakilan KBRI/KJRI/KDEI di luar negeri.



Pengiriman Pos

Layanan pemungutan suara bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara di TPS



Kotak Suara Keliling (KSK)

Kotak suara yang akan mendatangi tempat-tempat pemilih berkumpul atau bekerja atau bertempat tinggal.

Penyelenggara

4

PPLN (Penyelenggara Pemilihan Luar Negeri)

Bertempat di kantor perwakilan dan berfungsi dalam persiapan sampai evaluasi pelaksanaan Pemilu, juga membentuk KPPSLN.

KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri)

Berfungsi menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara.

Fakta lainnya:

- 1 Daerah Pemilihan Luar Negeri masuk dalam **Daerah Pemilihan II DKI Jakarta**, yang juga meliputi wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
- 2 Jumlah pemilih untuk **Daerah Pemilihan II DKI Jakarta** mencapai **4.563.926 orang**, **45 persennya** adalah pemilih di luar negeri.
- 3 Terdapat **105 Calon Anggota Legislatif DPR RI** dari **16 Partai Politik** peserta pemilu yang berkontestasi di Dapil II DKI Jakarta, dengan jumlah kuota pemilihan sebanyak **7 kursi**.
- 4 Pemilu 2019 adalah **pemilu pertama** yang dilakukan untuk memilih **Anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden** dalam waktu yang bersamaan.

Peserta Pemilu 2019 di Luar Negeri

Calon Presiden dan Wakil Presiden

01



CALON PRESIDEN
Ir. H. JOKO WIDODO

CALON WAKIL PRESIDEN
Prof. Dr. (H.C.) KH. MA'RUF AMIN

PARTAI PENGUSUNG:



02



CALON PRESIDEN
H. PRABOWO SUBIANTO

CALON WAKIL PRESIDEN
H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

PARTAI PENGUSUNG:



Partai Politik untuk Calon Legislatif DPR-RI

Sebanyak 49 orang atau 47% dari 105 Caleg di Dapil II DKI Jakarta II adalah Caleg perempuan.

 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 3 CALEG PEREMPUAN 4 CALEG LAKI-LAKI	 PARTAI GERINDRA 3 CALEG PEREMPUAN 4 CALEG LAKI-LAKI	 PDI PERJUANGAN 3 CALEG PEREMPUAN 4 CALEG LAKI-LAKI	 PARTAI GOLKAR 3 CALEG PEREMPUAN 4 CALEG LAKI-LAKI
 PARTAI NASDEM 4 CALEG PEREMPUAN 3 CALEG LAKI-LAKI	 PARTAI GARUDA 2 CALEG PEREMPUAN 2 CALEG LAKI-LAKI	 PARTAI BERKARYA 3 CALEG PEREMPUAN 4 CALEG LAKI-LAKI	 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 4 CALEG PEREMPUAN 3 CALEG LAKI-LAKI
 PARTAI PERINDO 3 CALEG PEREMPUAN 4 CALEG LAKI-LAKI	 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 4 CALEG PEREMPUAN 3 CALEG LAKI-LAKI	 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 3 CALEG PEREMPUAN 4 CALEG LAKI-LAKI	 PARTAI AMANAT NASIONAL 3 CALEG PEREMPUAN 4 CALEG LAKI-LAKI
 PARTAI HANURA 3 CALEG PEREMPUAN 3 CALEG LAKI-LAKI	 PARTAI DEMOKRAT 3 CALEG PEREMPUAN 4 CALEG LAKI-LAKI	 PARTAI BULAN BINTANG 2 CALEG PEREMPUAN 4 CALEG LAKI-LAKI	 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 3 CALEG PEREMPUAN 2 CALEG LAKI-LAKI

Tidak Ada Pekerja Migran dalam Debat Perdana Calon Presiden

Debat perdana semestinya menjadi tolok ukur pertama bagi pemilih untuk menilai bagaimana kemampuan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menyampaikan narasi dan argumentasi. Begitupun bagi kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden, debat perdana harusnya menjadi ajang yang strategis untuk menunjukkan kapabilitas mereka kepada publik dan masyarakat pemilih. Dalam Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengagendakan lima rangkaian debat yang disiarkan langsung dan dibagi secara tematis, dengan rancangan formasi yang berbeda-beda. Ada yang melibatkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, ada sesi debat khusus untuk Calon Presiden, juga sesi khusus untuk Calon Wakil Presiden. Debat pertama telah dihelat pada 17 Januari 2019 dengan tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Performa kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam debat perdana memunculkan banyak penilaian. Ada yang menilai baik, ada pula yang

menilai kurang. Sementara jika meninjau substansi debat, sepertinya kedua pasangan kandidat belum mengeksplorasi materi-materi secara strategis. Untuk isu hukum dan HAM misalnya, banyak isu-isu strategis yang tidak dibahas atau disampaikan oleh kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Salah satunya adalah isu pekerja migran.

Jika membaca peta pembagian tematik Debat Pemilihan Presiden 2019, memang isu pekerja migran akan lebih mengarusutama dalam debat ketiga yang bertemakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Namun sebetulnya, banyak dimensi isu pekerja migran yang bisa diangkat dan sangat berkaitan dengan tema hukum, HAM, korupsi dan bahkan terorisme. Karena sebagaimana diketahui, banyak kasus-kasus pekerja migran beririsan dan bahkan masuk kategorisasi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di lintas batas negara. Mulai dari pelanggaran hak untuk dilindungi, hak berkomunikasi, hak politik, serta

hak-hak fundamental lainnya.

Dalam dimensi penegakan hukum dan HAM misalnya, pasangan calon nomor urut 01 semestinya dapat menyampaikan upaya-upaya progresif dalam penegakan hukum dalam perlindungan pekerja migran. Salah satunya, pengesahan Undang-Undang No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang disahkan oleh Calon Presiden petahana. UU PPMI secara substansi menjadi landasan hukum yang transformatif dalam memberikan perspektif perlindungan yang lebih kuat dan komprehensif dalam tata kelola perlindungan pekerja migran ketimbang regulasi sebelumnya. Di sisi yang lain, pasangan calon nomor urut 02 juga sebetulnya dapat mengkritisi bagaimana UU PPMI belum terimplementasi dengan baik karena masih banyak celah permasalahan serta terdapat aturan turunan yang belum rampung digarap oleh Pemerintah.



Dok. Migrant CARE/2014

Terkait korupsi, tentu kita bisa merelevansikan kerawanan praktik korupsi dalam tata kelola migrasi tenaga kerja di Indonesia yang kemudian mengarah pada kejahatan perdagangan orang. Merunut waktu ke belakang, di tahun 2014, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kupang dinyatakan terlibat langsung dalam pembuatan dokumen perjalanan palsu dan melindungi proses pengiriman anak sebagai buruh migran. Kasus keterlibatan aparat penegak hukum dan mafia peradilan juga dapat dijadikan sebuah contoh. Masih dari Nusa Tenggara Timur, di tahun 2015, seorang Brigadir Polisi harus mengalami kriminalisasi berupa hukuman indiscipliner karena bertentangan dengan atasannya yang terlibat dalam mata rantai perdagangan orang. Maraknya kasus korupsi yang sejalan lurus dengan situasi perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur ini yang juga kemudian menjadikan wilayah ini sebagai zona darurat trafficking.

Belum lagi menyoal terorisme, situasi terkini sebetulnya telah menunjukkan bagaimana kerentanan pekerja migran pada pusaran sel-sel radikalisme dan ekstremisme di berbagai belahan dunia. Keterbukaan akses dan minimnya upaya-upaya mitigasi dalam proses migrasi tenaga kerja menjadikan pekerja migran di beberapa wilayah terindikasi dan bahkan terlibat langsung dalam aksi terorisme.

Rangkaian situasi di atas sebetulnya telah menunjukkan betapa isu pekerja migran sangat beririsan dengan tema debat calon presiden yang pertama. Namun sayang, tidak ada satu pun sudut pandang ini digunakan sebagai perspektif konkrit yang diterjemahkan dalam retorika debat. Kedua pasangan calon masih tersandera pada persoalan makro dan batas kontekstual yang sempit. Padahal jika merujuk dokumen visi, misi dan program kerja, kedua kandidat memiliki peluang untuk memperkuat dan mengeksplorasi argumentasi berdasar kerangka visi dan misi yang dibuat. Bahkan di antaranya ada yang secara eksplisit mencantumkan perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai subyek rencana kerja. Namun disayangkan, pada helat debat perdana calon presiden dan wakil presiden, pekerja migran masih termarjinalkan dalam konteks hukum, HAM, korupsi dan terorisme. (YOVI)

KILAS PROBLEMATIKA

Pemilu tidak Serentak di Luar Negeri

Warga negara Indonesia di luar negeri yang sebagian besarnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan mengawali Pemilu yang ternyata tidak serentak. Tidak seperti Pemilu di dalam negeri yang hanya satu hari, mereka akan melaksanakan early voting pada tanggal 8 sampai 14 April 2019 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bercermin dari Pemilu 2014, early voting ternyata dapat menarik lebih banyak partisipasi PMI untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Tercatat pada Pemilu 2014, terdapat peningkatan jumlah pemilih yang cukup signifikan, yaitu 22,19 persen atau 464.458 pemilih dari jumlah Pemilu sebelumnya.



PRT Migran asal Indonesia yang mengantri untuk memberikannya suaranya pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Victoria Park, Hongkong. (Dok. Migrant CARE)

Persoalan jumlah PMI di luar negeri hingga saat ini belum pernah tuntas. Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) luar negeri sebanyak 2.058.191, lebih banyak dari DPT tahun 2014 sebanyak 2.025.005 pemilih, tetapi menurut Migrant CARE tidak merepresentasi jumlah PMI sesungguhnya. Ironisnya pemerintah tidak memiliki data tunggal jumlah PMI hingga saat ini.

Kementerian luar negeri mencatat per Agustus 2017 jumlah PMI mencapai 4.732.555. Sebanyak 2.862.495 PMI berdokumen, sedangkan 1.870.060 lainnya tak berdokumen. Sementara itu, berdasarkan data penempatan BNP2TKI sepanjang tahun 2011 hingga 2018, mencatat 2.955.160 pekerja migran Indonesia di luar negeri. Berbeda dengan Kemenlu dan BNP2TKI, Bank Indonesia (BI) malah memperkirakan jumlah PMI sebanyak 9 juta.

Masalah data

BI mencatat pada tahun 2018 remitansi pekerja migran Indonesia ke dalam negeri mencapai US\$ 8,8 miliar setara dengan Rp128 triliun. Angka remitansi ini tidak meliputi transfer dana dari PMI yang tidak melalui transaksi perbankan.

Akar masalah ini tampaknya terkait dengan masih banyaknya pekerja migran RI di luar negeri yang tidak berdokumen. Hanya menyalahkan mereka yang tidak berdokumen tentu bukan sikap yang bijaksana. Karena banyak faktor yang membuat pekerja migran RI tidak berdokumen. Di tengah perubahan arah perlindungan pekerja migran saat ini, banyak Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang masih melaksanakan praktik perekrutan dengan skema jeratan utang dan migrasi berbiaya mahal.

Perbedaan mekanisme

Selama ini mekanisme pemungutan suara di luar negeri menggunakan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dropboxes dan pos. Pada Pemilu tahun ini, mekanisme pemungutan suara melalui dropboxes diganti menjadi Kotak Suara Keliling (KSK). Perubahan ini perlu diapresiasi, mengingat berdasarkan pemantauan Migrant CARE pada Pemilu 2014 di luar negeri, pemilihan melalui dropboxes rentan terjadi kecurangan dan pelanggaran.

Hal ini dapat terjadi karena minimnya pengawasan. Pada praktiknya dropboxes ditempatkan di pabrik-pabrik dan perkebunan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) tanpa pengawasan memadai. Setelah tiga hari diambil kembali. Di sinilah celah pelanggaran terbuka cukup lebar bagi

mereka yang memiliki niat tidak baik. Dengan mekanisme KSK, tidak ada lagi kotak suara yang mengingap. Pada Pemilu kali ini akan dibuat sebanyak 1.501 KSK untuk menampung 808.962 pemilih. 723,701 pemilih (35 persen) menggunakan pos. Dan 517,128 pemilih (25 persen) memberikan suaranya di TPS.

Pengawasan Pemilu di luar negeri mesti mendapatkan perhatian serius, karena panitia pengawas luar negeri hanya ada di 34 perwakilan RI. Sementara PPLN ada di 130 perwakilan RI. Untuk itu keberadaan mahasiswa, diaspora, dan warga negara RI lainnya sangat penting untuk melakukan pengawasan dan pemantauan untuk Pemilu yang jujur dan adil di luar negeri.

Hingga kini Malaysia menjadi negara tujuan yang paling banyak diminati PMI. Selain karena faktor kedekatan geografis, juga ada kemiripan bahasa dan budaya. Sebagai negara tujuan utama, tidak aneh bila masalah pekerja migran Indonesia paling banyak terjadi di sana. Paralel dengan hal itu, jumlah pemilih terbanyak pada Pemilu tahun ini di luar negeri juga di Malaysia. Yaitu sebanyak 1.059.785 pemilih. Sebanyak 67 persen pemilih akan menggunakan KSK yang tersebar di Kuala Lumpur (376 KSK), Johor Bahru (235 KSK), Kota Kinabalu (418 KSK), Kuching (288 KSK), dan Penang (91 KSK). Sementara 212.268 pemilih akan menggunakan hak pilih mereka secara langsung melalui TPS dan 212.778 pemilih menggunakan pos. Untuk itu Malaysia kunci bagi siapa saja untuk memenangi Dapil luar negeri.

Malaysia kunci suara PMI

Tingginya jumlah pemilih yang akan menggunakan haknya melalui 1.501 KSK di seluruh Malaysia membutuhkan kecermatan dan kesungguhan untuk mengantisipasi pelanggaran. Hal yang perlu dicermati, pertama, rasio jumlah KSK dengan ketersediaan Panwas luar negeri. Terutama di wilayah-wilayah yang terbatas aksesnya seperti perkebunan yang di pedalaman. Hal ini untuk mengantisipasi pelanggaran yang terjadi, terutama untuk memastikan apakah yang memilih benar-benar pemilih yang sah. Kedua, pengawasan yang cukup untuk mengantisipasi mobilisasi pemilih oleh Timses Caleg atau Capres. Kasus Pemilu 2014 di Malaysia ditemukan ribuan suara melalui dropboxes dicoblos secara masif yang diduga bukan oleh pemilik suara sah. Ketiga, pengamanan perjalanan KSK baik ketika menuju lokasi, hingga kembali ke perwakilan RI.

Sementara itu, potensi masalah pada mekanisme pemungutan suara dengan pos juga tidak sedikit. Pengalaman pemantauan Migrant CARE pada Pemilu 2014 memperlihatkan bahwa 53 persen surat suara melalui pos tidak sah karena saat dikirimkan kembali ke perwakilan RI tidak menyertakan formulir C4 sebagai prasyarat keabsahannya. Sehingga penting untuk sosialisasi masif kepada buruh migran di negara-negara yang banyak menggunakan pilihan dengan pos, seperti Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Tidak kalah penting, belajar kasus Hong Kong Gate yang sempat membuat kacau Pilpres 2014 di Hong Kong. Membeludaknya pemilih yang tidak terdaftar, namun ingin menggunakan hak pilihnya, tidak dapat diakomodasi karena izin tempat di Victoria Park hanya sampai jam 5 sore.

Benar kiranya bila selama ini suara PMI selalu menjadi rebutan para Caleg maupun Capres yang berkompetisi dalam setiap Pemilu. Pada Pemilu tahun ini, setidaknya ada lebih dari seratus Caleg yang berlaga di luar negeri yang notabene bagian dari Dapil DKI II. Banyak di antara mereka yang sebelumnya tidak pernah menunjukkan empati terhadap nasib pekerja migran, tapi mendadak sangat peduli terhadap nasib mereka dan anggota keluarganya.

Kepada mereka jelas pekerja migran tak bisa membangun mimpi dan harapan perlindungan. Untuk itu ada baiknya ke depan luar negeri menjadi Dapil tersendiri sehingga tidak hanya suara mereka saja yang diperebutkan, tapi juga aspirasi dan keterwakilan mereka benar-benar diperhatikan. (ANIS)

Artikel ini telah dimuat di Media Indonesia pada Selasa, 29 Jan 2019

OPINI

Perempuan dan Nihilisme Demokrasi

Teori demokrasi yang dijustaposisikan dengan feminisme akan mengkritik politik arus utama. Politik mainstream tersebut punya metodologi maskulin yang berwatak falus sejak hanya mencari kekuasaan dan melupakan substansi sejarah politeia. Kini ia bernafaskan kepentingan yang menghasilkan kemandekan dialektika soal kesejahteraan dan sebagainya. Ditambah politik klientelisme yang menjadikan politik sebagai alat sekumpul elitis.

“

THE RISING OF THE
WOMEN MEANS THE
RISING OF THE RACE
AND IDLER, TEN THAT
TOIL WHERE ONE RE-
POSES
BUT A SHARING OF
LIFE'S GLORIES: BREAD
AND ROSES, BREAD AND
ROSES.

– JAMES OPPENHEIM (1882–1932),
BREAD AND ROSES

”

untuk kampanye yang serba dangkal. Lebih dari itu, politik harus kembali pada ideologi demokrasi yang egaliter dan berbasis HAM. Dengan konsekuensi logisnya yang akan menghasilkan keadilan yang adil dan beradab. Tak terkecuali pada siapapun dan tak sebaliknya.

Seorang pendukung HAM akan serta-merta menjadi seorang demokratis. Namun, seorang demokratis tak membuatnya menjadi seorang pendukung HAM. Kekhawatiran ini muncul saat ide demokrasi dilepas menjadi wacana yang tak terpadu. Situasi ini yang kemudian membentuk kekosongan ruang yang status-quo nya bisa diputarbalikkan oleh politik kekuasaan yang dinikmati para aktor dengan maksud tertentu. Maksudnya, nama demokrasi diidentikkan dengan bentuk kebebasan yang jauh dari kemawasan. Contohnya ada pada keleluasaan kaderisasi partai yang tak bersih, bermahar, hingga pencalonan seorang eks-koruptor. Padahal, pengkaderan khususnya untuk jabatan politik harus dilakukan seterbuka mungkin. Momen pemilihan umum yang sering dikatakan sebagai pesta demokrasi masih dihadapkan pada situasi para pemilih yang masih jauh dari ketercukupan informasi dan kemampuan berpikir. Pesta demokrasi akan sekejap

Sulit ditemui narasi tentang kewarganegaraan dan kemerdekaan. Apalagi HAM dan kemartabatan. Padahal, politik dengan identitas demokrasi seharusnya menjadi jembatan antara negara dan rakyatnya untuk dapat mencapai keadilan dengan iklim yang tak represif. Sebuah republik yang jauh dari asas tersebut terlihat sedang mencari cara untuk menghapus politik dari usaha re-publik. Pertanyaannya kini, mengapa perempuan kurang terwakili dalam politik? Mampukah kita berbicara tentang demokrasi ketika perempuan tidak sepenuhnya ada dalam pengambilan keputusan politik?

Pemilu tahun 2019 ini diramaikan oleh figur perempuan yang akan duduk di parlemen. Bagi kultur patriarkis, perempuan hanya ada di ruang privat. Tak pantas di ruang publik. Sehingga politik yang ada di lokus publik hanya milik laki-laki. Dengan begitu, dominasi dimungkinkan. Perempuan yang terjun dalam politik menjadi harapan besar bagi narasi feminisme dan keadilan sosial dalam ruang politik. Meski begitu, perempuan dalam legislasi harus tetap diskrutinisasi. Apakah ia memiliki visi untuk isu perempuan? Apakah ia sekadar dikultuskan oleh dinasti politik yang oligark?

Agenda politik dengan keputusan afirmasi bahwa perempuan harus mendapatkan kuota 30% mungkin progresif di Pemilu tahun 2014. Tetapi bila lima tahun telah berlalu dan pemenuhan kuota masih jadi urusan formalitas, tentu ini menjadi sebuah kemunduran. Tubuh politik tak bicara tentang formalitas. Tubuh politik tak berbicara kuantitatif atas kuota

menjadi pesta mobokrasi. Kerentanan tersebut bagi kelompok politik yang sebatas memikirkan kekuasaan dengan kaderisasi kepartaian yang buruk, akan memanfaatkan keadaan hampa semacam ini.

Demokrasi telah mengecewakan perempuan. Politik tak hanya bertahan pada arus utamanya dengan hanya laki-laki sebagai yang-politis, tetapi juga telah melewati tindakan non-etis. Sejatinya, kebenaran dan kekuasaan bisa berarti sebuah kontemplasi besar jika perspektif etik masuk di dalamnya. Demokrasi membutuhkan gairah pemikiran yang setara dan egaliter. Ini yang kemudian membuat Pemilihan Umum lebih cocok dibidang perjuangan ketimbang sebuah pesta.

Kendati secara riil demokrasi berujung tombak pada sistem elektorat, bukan mengiyakan bahwa demokrasi hanya substansi pada perjuangan partai politik untuk memenangkan kuota untuk masuk ke parlemen. Menihilkan aspek perjuangan sipil marginal dalam pencapaian keadilan adalah kemunduran. Kita harus bisa mencapai titik dimana politik bukan sekadar soal konstitusi. Yang kita lihat hari-hari ini, standar demokrasi terus turun ke titik nol. Kian menjauhkan perempuan dan kelompok paling tertinggal untuk dapat menikmati akses keadilan dalam bentuk apapun. Ditambah hierarki politik yang oligarkis semakin menutup narasi feminisme dan kepentingan perempuan dalam agenda politik. Indonesia membutuhkan kedamaian dan harapan yang ada untuk hari esok. Pemimpin perempuan yang bisa mewakili suara yang tak terdengar. Pemimpin yang memiliki analisis kuat untuk berbicara kesejahteraan dan keadilan sosial.

Setidaknya disini kita masih sepakat akan dua hal: masuknya perempuan dalam parlemen adalah agenda feminis, bukan feminisasi alat politik. Sebab perempuan adalah tentang identitas gender yang penuh dengan pergulatan power-over, bukan tentang jenis kelamin. Kedua, keterwakilan perempuan dalam tubuh politik adalah standar bagi sebuah negeri yang mengaku demokratis. Seperti puisi Oppenheim di atas; demokrasi tak hanya untuk kesejahteraan –metafor dari sepotong roti atau Bread, namun juga harus untuk cinta-kasih dan penghargaan martabat perempuan, seumpama bunga atau Roses. (SAFINA)



Aksi Kolektif Masyarakat Sipil Memastikan Agenda Perlindungan Perempuan

Jakarta, 3 Maret 2019 – Menyambut Hari Perempuan Internasional 8 Maret mendatang, Migrant CARE, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan KAPAL Perempuan mewakili koalisi masyarakat sipil penggerak isu perempuan menyelenggarakan acara “Perempuan Bersuara: Dialog Calon Legislatif (Caleg) Perempuan Merespons Agenda Perlindungan Perempuan”.

Dialog ini mengetengahkan tiga isu utama perlindungan perempuan, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, kekerasan seksual terhadap perempuan, dan perlindungan perempuan pekerja migran yang direspons oleh tujuh caleg perempuan dari Daerah Pemilihan Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri) yaitu Christina Aryani (Golkar), Dian Islamiati Fatwa (PAN), Nadhila Chairannisa (PKB), Nuraini (PDIP), dan Sri Saras Mundisari (PPP), Gina Erry Hernawati (PSI), dan Shanti Ramchand (Nasdem).

Wahyu Susilo selaku Direktur Eksekutif Migrant CARE membuka dialog caleg dengan menyampaikan belum adanya aturan turunan yang mengatur perlindungan sosial pekerja migran sejak berlakunya UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). “Mayoritas pekerja migran perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga sangat rentan menghadapi diskriminasi dan kekerasan, bahkan ada yang menghadapi ancaman hukuman mati. Aturan turunan UU No. 18/2017 harus menjawab persoalan tersebut.” ungkapnya. Selain itu, Wahyu menekankan pentingnya peningkatan kualitas diplomasi perlindungan pekerja migran Indonesia dalam politik luar negeri Indonesia.

“Saat ini, perhatian publik berfokus pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden, sehingga isu keterwakilan perempuan di parlemen dan agenda perlindungan perempuan tidak menjadi wacana publik,” ujar Dian Kartika Sari, Sekretaris Jenderal KPI. “Kami harap acara ini dapat menjadi pendidikan politik bagi calon pemilih sekaligus ajang unjuk gigi bagi caleg perempuan,” tambahnya.



Dialog caleg yang berpanelis empat perempuan; Sonya Hellen Jurnalis senior Harian Kompas, Ani Sutjipto Peneliti Politik dan Gender, Misi Misiyah direktur eksekutif KAPAL Perempuan, dan Murhayati dari Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah DKI Jakarta. Para panelis menagih janji para caleg perempuan untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Sebagai pengingat, kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat signifikan, mencapai 348.446 kasus (Komnas Perempuan, 2018) dan hal ini kian diperburuk oleh munculnya kebijakan-kebijakan diskriminatif yang melahirkan intoleransi di masyarakat; dari 421 kebijakan diskriminatif, 333 menyasar langsung pada perempuan. Panelis juga mengingatkan agar para caleg perempuan mendorong kebijakan yang ramah kaum disabilitas.

Christina Aryani representasi dari Golkar, menyampaikan visi-misinya, “Kelompok yang tak bisa bersuara untuk kepentingannya harus kita suarakan.” Ia juga menolak RUU yang rentan mengriminalisasi perempuan, vokal mendorong stop perkawinan anak yang menjadi sumber dari putaran kemiskinan, dan diskriminasi ke perempuan dengan mencontohkan kasus Baiq Nuril. “Tak semua perempuan beruntung mengenyam pendidikan. Vocational Training akan saya gagas.” Tambahnya untuk membentuk tenaga kerja produktif agar tak berketerampilan rendah.

Nadhila Chairannisa dari PKB dan sebagai caleg termuda, mengatakan isu perempuan akan diatasi melalui pendidikan. “Patriarki adalah kultur. Sudah menjadi budaya. Untuk membuat anak-anak kita keluar dari pemikiran ini, kita perlu mengajarkan tentang kesetaraan gender dari usia dini.” Ia memaparkan juga dalam pemikiran feminisme, the private is political. Baginya, kehidupan privat mencerminkan kehidupan sosial. Ia juga menambahkan pemikirannya tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, harus ada pelatihan yang komplit.”

Sonya Hellen sebagai panelis, mempertanyakan ke-tujuh caleg untuk merespon sejauh mana memahami RUU P-KS dan mengingatkan para caleg tentang RUU PRT yang sudah 15 tahun mangkrak. Ani Sutjipto juga menambahkan dalam dialog, tentang representasi caleg perempuan agar lebih substantif, tak untuk sekadar pemenuhan kuota. Dan Murhayati yang mendorong pembuatan kebijakan yang sensitif dan responsif bagi disabilitas.

Menanggapi ragam hal itu, Caleg Dian Islamiati Fatwa dari Partai PAN, menukas “Saya melihat soal perlindungan perempuan dari kekerasan adalah persoalan kita bersama dan harusnya menjadi agenda semua partai. Kenyataannya, banyak caleg perempuan yang bekerja pada isu perempuan tapi tak di dukung partai lainnya. Tidak semua partai ingin meloloskan perundang-undangan responsif gender.” Nuraini, Caleg Dapil 2 DKI Jakarta dari PDIP, menambahkan tentang prinsip-prinsip keberagaman yang harus tetap menjadi landasan untuk mempromosikan perlindungan sosial bagi perempuan.

Misiyah, Direktur Eksekutif KAPAL Perempuan sebagai panelis, memberikan tanggapan dan pesan penting “Pentingnya peran aktif caleg perempuan yang nanti terpilih untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keberanian untuk menangani masalah-masalah perempuan dan berhadapan dengan konservatisme yang saat ini makin menguat dan mengungkung perempuan” pungkasnya. Ia menekankan untuk memberikan perhatian khusus pada isu-isu perempuan miskin kota, Pekerja Rumah Tangga dalam negeri dan luar negeri untuk menjamin prinsip tak seorang pun ditinggalkan.

“Saya mendesak isu-isu penghapusan kekerasan seksual, penghapusan perkawinan anak, pemenuhan perlindungan sosial, perlindungan PRT dan pencegahan eksploitasi perempuan buruh migran dalam pusran ekstremisme” tambahnya.



Dokumentasi: MAMPU (2019)

Panelis Dialog Caleg Perempuan Dapil DKI Jakarta 2, dari kanan: Misiyah, Ani Sutjipto, Sonya Hellen, dan Murhayati

Penyusunan Modul Pendidikan Politik Bagi Pekerja Migran

Mekanisme baru yang diterapkan dalam Pemilu Serentak 2019 menjadikan seluruh pemilih menjadi ‘pemilih pemula’. Termasuk mekanisme pemilihan di luar negeri yang akan dilakukan lebih awal, dengan mekanisme yang beragam. Pada sisi yang lain, pelaksanaan Pemilu di luar negeri yang mayoritasnya diikuti oleh pekerja migran menghadapi tantangan berulang terkait rendahnya partisipasi politik dalam Pemilu.

Merespons hal tersebut, Migrant CARE menyusun pembaruan Modul Pendidikan Politik bagi Pekerja Migran Indonesia. Modul akan diterbitkan secara daring melalui:

www.migrantcare.net/pemilu2019



Nasib Perempuan Indonesia di Panggung Pemilu yang Maskulin

Penampakan wajah maskulinitas Pemilu 2019 bukan hanya didominasi oleh dominasi kontestasi Presiden dan Wakil Presiden yang memang kandidatnya semua lelaki, tetapi juga oleh dominasi Caleg laki-laki yang mencapai hampir 60% dibanding Caleg perempuan yang mencapai 40%. Meski sudah melewati ambang batas 30% kuota perempuan, namun menurut kajian Perludem, prospek keterpilihan Caleg perempuan masih jauh dari harapan jika menilik dari urutan kandidasi penetapan daftar calon tetap. Mayoritas nomor urut teratas yang memiliki peluang keterpilihan yang tinggi masih didominasi caleg laki-laki.

Selain itu, maskulin Pemilu 2019 juga terlihat dari marginalisasi isu-isu terkait perempuan dalam perbincangan dan perdebatan tentang program dan konten kampanye para kandidat. Dalam dua perdebatan kandidat Pilpres 2019 baik di term 1 (tentang penegakan hukum, HAM dan terorisme) maupun term 2 (tentang energi, sumberdaya alam, infrastruktur dan lingkungan) sangat miskin sekali perdebatan tentang permasalahan yang dihadapi perempuan baik dalam bidang hukum, HAM, penanganan terorisme, akses terhadap sumberdaya alam dan infrastruktur serta dampak kerusakan lingkungan.

Wajah maskulin nampak di perdebatan term 1 dimana dari 6 panelis didominasi oleh (5) laki-laki dan hanya menyisakan 1 panelis perempuan Bivitri Susanti dan 1 moderator perempuan Ira Koesno.

Satu-satunya konten perdebatan terkait perempuan hanya berupa pertanyaan atau tepatnya gugatan capres #01 Joko Widodo ke capres #02 Prabowo Subianto tentang tidak adanya perempuan yang menempati posisi strategis di kepemimpinan partai pimpinan Prabowo, Gerindra.

Dalam debat term 2 situasinya juga tidak berubah

Meski ada penambahan 2 panelis perempuan yaitu Yaya Hidayati (WALHI) dan Dewi Kartika (Konsorsium Pembaruan Agraria) namun perdebatan di term 2 yang berlangsung dinamis dan sengit ini sama sekali tidak menyisakan pertanyaan terkait dengan situasi kerentanan perempuan dalam thema-thema sumber daya alam, infrastruktur dan lingkungan.

Wajah maskulinitas juga mendominasi kontestasi perdebatan tentang Pemilu 2019 (terutama Pilpres 2019) di layar-layar televisi dan panggung-panggung yang disediakan oleh lembaga survey dan universitas. Sekali lagi, perempuan lebih sering hanya dihadirkan sebagai moderator ataupun penyiar berita, sementara agenda politik perempuan (yang tidak sekedar keterwakilan perempuan) makin terpinggirkan. Di lembaga survey, perempuan dihadirkan sebagai angka-angka statistik menjadi variable atas elektabilitas peningkat ataupun penurunan prosentase keterpilihan.

Nurhadi-Aldo sekalipun

Maskulinitas juga dihadirkan oleh kalangan yang pesimis atas prospek Pemilu 2019 yang dianggap tidak menawarkan kebaruan politik. Ketidakpercayaan pada kandidat Pemilu 2019 (terutama kandidat Pilpres 2019) mendorong mereka mempromosikan parodi kandidat Nurhadi-Aldo (Dildo) dalam bentuk meme yang disebarakan melalui berbagai platform sosial media. Pada mulanya, inisiatif ini dianggap sebagai fenomena penyegaran dari aroma Pemilu 2019 yang itu-itu saja, namun dalam perjalanannya konten-konten meme parodi kandidat Nurhadi-Aldo terjebak dalam artikulasi yang seksisme, melecehkan perempuan hingga akhirnya meme parodi ini melakukan bunuh diri ketika dalam satu tampilannya mengekspresikan keterpaksaan diasosiasikan sebagai situasi perkosaan. Ini dinilai oleh para aktivis feminis sebagai upaya mempromosikan budaya perkosaan (rape-culture). Feminist Tunggal Pawestri dalam artikelnya di laman BBC Indonesia sejak dini sudah mewanti-wanti bahwa meme parodi kandidat ini memiliki kecenderungan menormalisasi kecabulan dan berpotensi melecehkan seksualitas dan perempuan.

Faktor lain yang mengukuhkan Pemilu yang maskulin adalah berpengaruhnya isu terkait agama dalam Pemilu 2019. Harus diakui, keterpengaruhannya agama dalam proses pemilu juga akan memiliki faktor yang signifikan meminggirkan agenda-agenda perlindungan perempuan.

Jika selama ini para aktivis gerakan perempuan Indonesia sedang mengupayakan adanya penghentian praktik perkawinan anak dengan advokasi di berbagai level hingga meraih kemenangan kecil di putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Desember 2018, namun isu ini tidak mendapat perhatian utama dari para kandidat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden karena dianggap sebagai isu sensitif di kalangan yang mayoritas muslim. Walau menurut berbagai catatan organisasi internasional seperti UNICEF tentang tingginya angka sunat perempuan di Indonesia dan Indonesia juga memiliki komitmen untuk pencapaian SDGs dalam upaya penghapusannya, namun agenda penghapusan sunat perempuan juga sama sekali tidak disuarakan oleh para kandidat Pemilu legislatif dan Pemilu presiden.

Bagaimanapun juga isu sunat perempuan masih selalu dikaitkan dengan sensitivitas agama.

Tuntutan agar Indonesia segera memiliki Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akhir-akhir ini disuarakan oleh kalangan perempuan Indonesia hingga akhirnya menjadi salah satu RUU Prioritas yang harus diselesaikan masa persidangan DPR tahun 2019, diresistensi oleh kalangan Islam konservatif dan dipropagandakan sebagai legislasi yang pro-LGBT dan perzinahan. Resistensi ini sangat terkait dalam upaya untuk menggiring opini para pemilih muslim menolak partai-partai yang mendukung pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Bagaimana dengan TKW?

Marginalisasi agenda perlindungan perempuan dalam Pemilu 2019 ini tentu saja juga makin meminggirkan agenda perlindungan buruh migran Indonesia yang mayoritas perempuan dalam Pemilu 2019. Menurut pemantauan Migrant CARE atas proses penetapan daftar pemilih Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum hanya mampu menjangkau sekitar 30% (2,06 juta) pemilih di luar negeri dari seluruh jumlah warga negara Indonesia (yang mayoritas buruh migran perempuan) sekitar 6,5 juta. Selain dari sisi partisipasi, artikulasi politik buruh migran Indonesia juga belum mendapatkan tempat dalam politik representatif elektoral. Selama ini, suara pemilih luar negeri menjadi konstituen anggota parlemen dari daerah Pemilihan DKI II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri).

Berdasar pengalaman pemantauan kinerja anggota DPR-RI periode 2004-2009 dan Periode 2009-2014 mayoritas mereka yang terpilih dari daerah pemilihan ini tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mengartikulasikan kepentingan dan agenda perlindungan buruh migran Indonesia. Oleh karena itu, Migrant CARE sejak Pemilu 2009, bersama eksponen diaspora dan penggerak pemilu demokratis, terus mengusulkan agar konstituen pemilih di luar negeri mendapatkan hak politiknya dengan Dapil Luar Negeri, terpisah dari Dapil DKI II. (WAHYU)

Artikel ini telah dipublikasikan dalam Kolom Opini Deutsche Welle Indonesia, 8 Maret 2019

SIARAN PERS

Memperingati Hari Perempuan Internasional 2019



Tanggal 8 Maret ditetapkan sebagai peringatan Hari Perempuan Internasional. Peringatan ini merupakan hasil dari perjalanan panjang perjuangan perempuan di dunia dalam melawan beragam bentuk penindasan terhadap perempuan pekerja, meliputi upah dan jam kerja yang layak di era 1900-an. Sejak saat itu, Hari Perempuan Internasional terus dirayakan dengan berbagai cara untuk melawan kekerasan berbasis gender yang menyasar perempuan.

Tema yang diangkat Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun ini adalah “Think Equal, Build Smart, Innovate for Change”. Tema yang sangat relevan dengan situasi pekerja migran perempuan Indonesia yang penuh dengan kerentanan dan potret sektor marginal yang mencerminkan wajah ketimpangan.

Memikirkan, mengupayakan dan memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan pekerja migran Indonesia adalah hal yang mutlak untuk memastikan aturan turunan UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak mengabaikan realitas wajah pekerja migran Indonesia yang mayoritasnya adalah perempuan.

Sebanyak 69 persen Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah perempuan (BNP2TKI, 2018), sebagian besar dari mereka bekerja di sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT). Namun perlindungan masih semu karena aturan turunan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) belum juga dirampungkan. Tenggat waktu aturan pelaksana ini sudah di depan mata, tetapi belum bisa dipastikan apakah betul-betul responsif gender karena draf belum juga dibuka.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) yang tak juga masuk Program Legislasi Nasional menjadi standar ganda, bagi Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap PRT Migran Indonesia di luar negeri. Situasi ini diperumit dengan Konvensi ILO No.189 mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga saja tak kunjung diratifikasi.

Sejumlah 74 persen kasus yang didampingi Migrant CARE sepanjang tahun 2017-2018 adalah kasus pekerja migran perempuan dengan kategori kasus tertinggi, indikasi perdagangan orang. Tetapi pelaku, pelanggar hak asasi, penyiksa pekerja migran, masih dalam impunitas dan hukuman ringan, tidak pernah adil, minimal sebanding dengan yang dialami korban. Berbanding terbalik dengan ancaman penghukuman berat yang terus menghantui PMI di luar negeri.

Menurut catatan Migrant CARE, 5 dari 6 PMI yang dieksekusi mati di Arab Saudi adalah pekerja migran perempuan. Belum genap setahun hukuman mati menimpa pekerja migran perempuan asal Majalengka, Tuti Turslawati, yang dihukum mati karena membela dirinya dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh sang majikan.

Daya upaya untuk melindungi perempuan pekerja migran Indonesia tentu tidak cukup dengan aturan turunan UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Realitas ketimpangan yang terjadi, membuat perempuan terjauhkan dari akses sumberdaya, informasi, pengetahuan dan keadilan. Harus ada dorongan kebijakan dan langkah-langkah konkrit mendesak penyediaan akses sumberdaya, informasi dan pengetahuan yang memadai serta akses keadilan untuk perempuan pekerja migran Indonesia.

Mendekatkan Akses Pengetahuan, Mengembangkan Inovasi dan Teknologi yang Berpihak Pada Pekerja Migran

Dalam euphoria Revolusi Industri 4.0 yang sering dielu-elukan sebagai masa depan demografi ketenagakerjaan Indonesia seringkali abai dan melupakan kebutuhan angkatan kerja perempuan. Perbincangan tentang inovasi dan teknologi acapkali hanya menyasar pada kelompok-kelompok milenial perkotaan dan melupakan mereka yang terpinggirkan, termasuk perempuan pekerja migran. Jika ini terus berlangsung ketimpangan akan terus menganga. Dibutuhkan adanya keberpihakan yang jelas bahwa pengembangan inovasi dan teknologi harus mengutamakan mereka yang selama ini terpinggirkan.

Bagi perempuan pekerja migran, inovasi dan teknologi sangat dibutuhkan untuk memotong mata rantai keperantaraan manual yang selama ini membebani mereka dengan biaya yang tinggi. Inovasi dan teknologi bisa mendekatkan perempuan pada akses pengetahuan tentang kesadaran gender, perlindungan hak asasi, peningkatan ketrampilan dan kompetensi serta transaksi keuangan yang lebih mudah.

Di samping itu, Peringatan Hari Perempuan Internasional Tahun 2019 ini bertepatan dengan berlangsungnya kontestasi Pemilu 2019. Dalam penilaian Migrant CARE, Pemilu 2019 ini masih berwajah maskulin sehingga harus ada desakan yang kuat dari para pemilih agar peristiwa politik ini tidak melupakan aspirasi perempuan dan pekerja migran. Migrant CARE menyerukan pada perempuan dan pekerja migran agar pro aktif mendesak para kontestan untuk memiliki komitmen perlindungan perempuan dan pekerja migran Indonesia.

Jakarta, 8 Maret 2019

**Wahyu Susilo
Direktur Eksekutif Migrant CARE**

Dapatkan informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan pemilu di luar negeri melalui portal informasi Migrant CARE melalui www.migrantcare.net/pemilu2019

Juga portal informasi Komisi Pemilihan Umum yang dapat diakses melalui infopemilu.kpu.go.id atau unduh aplikasi berbasis android 'KPU RI PEMILU 2019' di Playstore.

Kamu juga dapat mengunjungi langsung perwakilan Indonesia (KBRI/KJRI) terdekat dan pastikan kamu terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2019.

MAMPU | Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

